



# KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						√																									

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
									√		

TAHUN

2015
------

HALAMAN

1b/5b
-------

## Pengguna Anggaran Ketakutan

# Akhir Oktober Optimistis Serapan Capai 50 Persen

Penyebab Serapan APBD Kaltara Terendah Ketiga di Indonesia

**TARAKAN** – Serapan APBD Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ketiga terendah se-Indonesia di semester I 2015. Dengan anggaran Rp 2.025.173.721.760,27, realisasi hanya Rp 364.673.997.519,00 atau 18,01 persen. Penjabat Gubernur Provinsi Kaltara Triyono Budi Sangsoko kepada Radar Tarakan, Senin (6/10) malam mengatakan, rendahnya serapan anggaran karena adanya ketakutan pengguna anggaran jika menjadi temuan pemeriksa.

"Ya itu (ketakutan menggunakan anggaran, red) biasa lah. Tetapi *kan* sekarang sudah bisa bertanya dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam menggunakan anggaran tersebut," ujar Triyono.  
Kepala BPK Provinsi Kaltara Ade Iwan Ruswana mengakui adanya indikasi kekhawatiran dan ketakutan da-

lam menggunakan anggaran sehingga penyerapannya pun kurang maksimal. Menurut Ade, seharusnya penggunaan anggaran untuk satu semester berada di level 50 persen.  
Melengkapi, Humas BPK Provinsi Kaltara Nugroho menyatakan, pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu takut atau khawatir dalam menggunakan anggaran jika memang sesuai dengan program kerja.  
Mengatasi persoalan ketakutan dan kekhawatiran dalam menggunakan anggaran, Triyono mengatakan telah melibatkan BPK maupun BPKP untuk

terus memberikan pendampingan atau asistensi terkait pengelolaan keuangan dan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran.  
Ditanggapi Nugroho, pihaknya tidak melakukan asistensi ataupun pendampingan terkait pengelolaan keuangan. Namun, BPK memang sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah berbasis akrual.  
Untuk diketahui, basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya

transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.  
"Kalau untuk mendampingi atau mengawasi dalam penggunaan anggaran kami tidak ada dan tidak bisa. Namun, kami memang akan memeriksa keuangan setelah terjadinya transaksi atau dijalkannya suatu program dan itu adalah bagian dari tugas kami, bukan berdasarkan permintaan pemprov," timpal Nugroho.  
Di dalam pemeriksaan akrual sebut

Nugroho, pemerintah daerah akan diberikan petunjuk dalam pengisian atau pelaporan keuangan daerah karena akuntansi berbasis akrual tersebut sendiri baru secara penuh diterapkan pada tahun anggaran 2015 secara nasional.  
**SDM PEMPROV KURANG**  
Selain ketakutan dalam menggunakan anggaran, Triyono juga mengeluhkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau jumlah pegawai di provinsi yang masih jauh dari jumlah kebutuhan yang diperlukan.  
"Untuk serapan kita memang masih

jauh tertinggal, karena memang SDM yang masih sangat terbatas. Idealnya, pegawai pemprov seharusnya memiliki 2.600 aparatur sipil negara, tetapi sekarang kaltara hanya memiliki 800 orang saja," aku Triyono. Adapun salah satu upaya Triyono untuk mengatasi masalah SDM adalah melantik pegawai eselon 3 dan 4. "Agar dapat meningkatkan serapan, kami sudah melantik 150 pegawai eselon tiga dan empat baru-baru ini," ujar Triyono. Triyono sendiri menargetkan serapan anggaran dapat mencapai 50 persen akhir Oktober 2015. (\*/ans/asm)